

MEMO HUKUM

NUR AZIZAH HIDAYAT

**EKSISTENSI DAN PENERAPAN UU NO. 11/PnPs/1963
TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
SEBAGAI SUMBER HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**

Pid 674/95

Hid

e



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1995**

**EKSISTENSI DAN PENERAPAN UU NO. 11/PnPs/1963
TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
SEBAGAI SUMBER HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**



MEMO HUKUM

*Diajukan sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum*

Pembimbing,


SOEHARJO, S.H.

NIP. 130 517 139

Penyusun,


NUR AZIZAH HIDAYAT

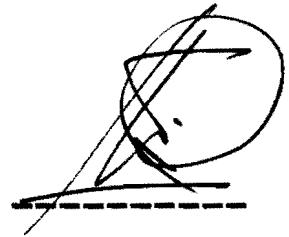
NIM. 039013166

TELAH DIUJI,

Hari : **S e l a s a**
Tanggal : **1 Agustus 1995**

TEAM PENGUJI

K e t u a : **Richard Wahjoedi, S.H., M.S.**



Handwritten signature of Richard Wahjoedi, S.H., M.S. above a dashed line.

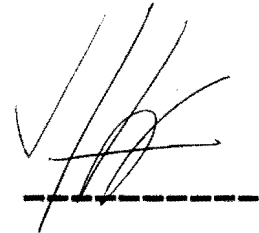
Sekretaris : **Soedarti, S.H.**



Handwritten signature of Soedarti, S.H. above a dashed line.

Anggota :

1. **Soecharjo, S.H.**



Handwritten signature of Soecharjo, S.H. above a dashed line.

UUPKS tidak bisa diterapkan dalam kasus Hariman Siregar karena unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 angka 1 sub a, b, c dan d UUPKS tidak terpenuhi.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Meskipun UUPKS bersifat sementara karena hanya berlaku sampai terbentuknya UU baru yang materinya merupakan penyempurnaan materi UUPKS, tetapi masih merupakan salah satu sumber hukum positif bagi hukum pidana politik di Indonesia baik dari segi formal maupun materilnya.
- b. Dalam menerapkan UUPKS yang bersifat exceptionil, seorang hakim diwajibkan untuk menafsirkannya secara ekstensif, sistematis dan futuristik. Kebebasan hakim menafsirkan tersebut dibatasi oleh sistem hukum negara dan masyarakatnya atau dibatasi oleh ide hukum yang hendak diwujudkan oleh negara dan masyarakatnya.
- c. UUPKS termasuk dalam delik politik, meskipun perumusan deliknya tidak menggunakan istilah delik politik, tetapi ditegaskan dalam penjelasan umumnya bahwa subversi selalu berhubungan dengan politik. Jadi adanya latar belakang politik merupakan unsur yang paling esensial dan harus dapat dibuktikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana subversi.

- d. Sehubungan dengan hal itu, UUPKS tidak dapat diterapkan dalam kasus Hariman Siregar, karena tidak ada latar belakang politiknya. Disamping itu unsur-unsur pasal 1 ayat 1 angka 1 sub a, b, c dan d UUPKS juga tidak terpenuhi.

2. Saran

- a. Penyelesaian secara operasional pembangunan hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sangat diperlukan karena berhubungan langsung dengan pencari keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu UUPKS harus segera diubah sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1969, atau dicabut dengan membiarkan peraturan tentang kejahatan politik dalam KUHP sebagai satu-satunya peraturan yang berlaku.
- b. Sehubungan dengan dirumuskannya Rancangan UU tentang KUHP (RUUKUHP) saya berpendapat bahwa sebaiknya delik ideologi yang dirumuskan dalam RUUKUHP dijadikan delik materil karena jika dirumuskan sebagai delik formal tidak mustahil akan menjadi bom waktu yang siap meledak setiap saat karena sifatnya yang eksepsional.